

HALAMAN VERIFIKASI
RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL
TAHUN 2023

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 2022

Koordinator Bidang
Ekonomi, Sumber Daya Alam dan
Infrastruktur

Sub Koordinator
Bidang Ekonomi

YUSUF EDI N, ST, M.Sc, M.Eng
NIP. 19760921 200501 1 006

DWI FATMA A., SE, M.Ec.Dev
NIP. 19810619 200501 2 016

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Pemerintah Dinas Penanaman Modal dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Tahun 2023. Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Perencanaan Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja (Renja) ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas – tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan (guideline) bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas – tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap OPD termasuk Dinas Penanaman Modal.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas – tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kabupaten Temanggung dan Dinas Penanaman Modal.

Temanggung, Mei 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung

MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom.

Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL TAHUN 2020	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2020.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal	44
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	45
2.5 Penelaahaan Usulan Progran dan Kegiatan Masyarakat ...	55
2.6 Inovasi Perangkat daerah.....	55
2.7 Penghargaan.....	56
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL	57
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	57
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal.....	57
3.3 Program dan Kegiatan	59
BAB IV PENUTUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

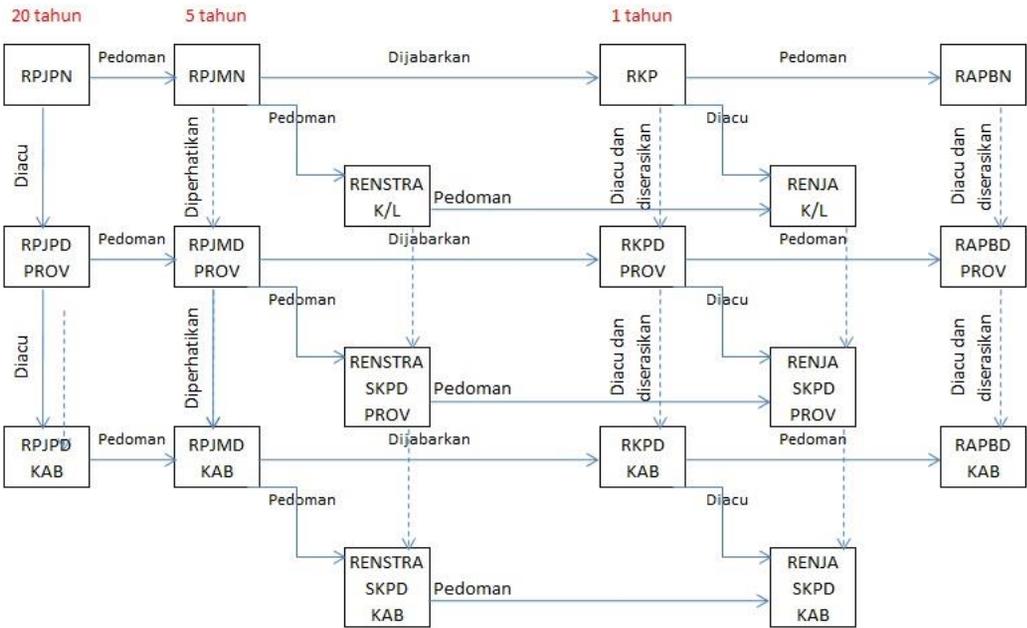
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal

Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Penanaman Modal, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Penanaman Modal, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Penanaman Modal;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Penanaman Modal;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Dinas Penanaman Modal;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Penanaman Modal;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Penanaman Modal; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Penanaman Modal.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Dinas Penanaman Modal untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, dan perkiraan realisasi tahun 2022 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2022;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra Dinas Penanaman Modal;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Dinas Penanaman Modal dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Dinas Penanaman Modal tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Dinas Penanaman Modal;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Dinas Penanaman Modal dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Dinas Penanaman Modal sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Dinas Penanaman Modal.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal

dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Penanaman Modal.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Dinas Penanaman Modal.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan

pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Penanaman Modal. Namun dalam proses ini Dinas Penanaman Modal mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN
MODAL TAHUN 2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL
TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra DPM Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Penanaman Modal sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra Dinas Penanaman Modal 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal
s.d Tahun 2021

No	Bidang/ Program / Kegiatan	Indikator kerja /Program / Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan 2021								Realisasi		Capaian		Ket
							I		II		III		IV		2021		2021		
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	PENANAMAN MODAL				16.240.708.500	1.011.708.500		61.414.719		137.180.298		187.314.369		439.748.460		825.657.846			
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				210.000.000	83.416.200		3.630.800		8.311.326		34.000.000		33.868.750		79.810.876		95,68	
		Nilai Realisasi Investasi	%	432		28,32	369,37		175,62		469,24		482,43		1.496,66		100		
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10		0	28,32		28,32		28,32		28,32		28,32		100		
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100			0		0		100		100		100		100		
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terselenggaranya Kegiatan Forum Investasi Berbasis Kewilayahan	Kegiatan	4	210.000.000	83.416.200		3.630.800	1	8.311.326	1	34.000.000	2	33.868.750	4	79.810.876	100	95,68	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1 (%)																100			
Predikat																Sangat Rendah			

RENJA 2023 | DINAS PENANAMAN MODAL

No	Bidang/ Program / Kegiatan	Indikator kerja /Program / Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan 2021								Realisasi		Capaian		Ket
							I		II		III		IV		2021		2021		
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Program Promosi Penanaman Modal				310.000.000	149.999.609		15.786.000		7.073.000		3.862.500		116.125.000		142.846.500		95,23	
		Persentase tersedianya informasi peluangsaha sektor/bidang unggulan	%	100			60		60			60		60		60		60	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terpublikasinya informasi investasi diluar pameran	Kegiatan	4	50.000.000	149.999.609	1		0	7.073.000			3	116.125.000	4	142.846.500		100	
		Terselenggaranya matchmaking dan promosi & investasi	Kegiatan	4	210.000.000		0		0			3.862.500	4				4		100
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan PM kepada masyarakat dan dunia usaha dan Peraturan Perundangan	orang	200	50.000.000		0		100			100					200		100
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A2 (%)																	100		
Predikat																	Sangat Rendah		
3	Program Pelayanan Penanaman Modal				450.708.500	330.191.000		41.927.919		63.411.572		54.186.441	6	144.276.410		303.802.342		92,01	

No	Bidang/ Program / Kegiatan	Indikator kerja /Program / Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan 2021								Realisasi		Capaian		Ket	
							I		II		III		IV		2021		2021			
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Persentase pelayanan perizinan online	%	100			97,03		98,04		99,15		97,81		98,34		98			
		Persentase perizinan yang bebas calo	%	100			100		100		100		100		100		100			
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95			100		100		100		100		100		100			
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik	Terlaksananya percepatan pelayanan perizinan	Bulan	12	70.000.000		3		3		3		3		12		100			
Terlaksananya percepatan pelayanan perizinan dengan baik		Bulan	12	128.708.500	314.280.500	3	37.422.919	3	57.983.572	3	51.871.411	3	140.702.910	12	287.980.842	100	91,63			
Terlaksananya percepatan pelayanan perizinan satu pintu		Bulan	12	200.000.000		3		3		3		3		12		100				
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terselesainya pengaduan dan gugatan di pengadilan	Bulan	12	52.000.000	15.910.500	3	4.505.000	3	5.428.000	3	2.315.000	3	3.573.500	12	15.821.500	100	99,44		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A3 (%)																100				
Predikat																Sangat Tinggi				

No	Bidang/ Program / Kegiatan	Indikator kerja /Program / Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan 2021								Realisasi		Capaian		Ket
							I		II		III		IV		2021		2021		
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				15.270.000.000	447.476.500	3	70.000		58.384.400	4	95.265.428	4	145.478.300	3	299.198.128		67	
		Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100			13,33		13,33		93,65		93,65		93,65		93,65		
		Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100			60		100		100		100		100		100		
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100			0		100		100		100		100		100		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PM	Bulan	12		50.820.000	3		3	14.371.000	3		3	14.887.500	12	14.887.500	100		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya temu usaha dalam rangka Penanaman Modal di luar daerah Kab Temanggung dan dalam daerah berbasis potensi unggulan daerah	Kegiatan	2	105.000.000	247.258.800		70	1	22.670.900	1	66.400.000		100.604.500	2	22.740.900	100	9,20	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya MONEV dan Pelaporan LKPM	Kegiatan	2	30.000.000	149.397.700	0		1	21.342.500		28.865.428	1	29.986.300	2	80.194.228	100		
		Terlaksananya MONEV PATEN	Kegiatan	2	25.000.000		0		1				1				2	100	

No	Bidang/ Program / Kegiatan	Indikator kerja /Program / Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan 2021								Realisasi		Capaian		Ket	
							I		II		III		IV		2021		2021			
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Terlaksananya Pembangunan Mal MPP	Kegiatan	1	15.000.000.000		0		0							-		-		
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan	Bulan	12	70.000.000		3		3		3		3		12		100			
		Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan LKPM	Orang	50	40.000.000		0		0						-		-			
Rata-rata Capaian Kinerja pada Program A4 (%)																	100			
Predikat																	Sangat Tinggi			
B	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH			100	4.569.496.964	3.568.301.696		819.780.290		929.107.251		741.780.144	29	777.571.875	-	3.268.239.560	100	91,59		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	4.569.496.964	3.568.301.696		819.780.290		929.107.251		741.780.144	29	777.571.875	-	3.268.239.560	100	91,59		
		Tersedianya administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	%	100	4.569.496.964	3.568.301.696	25		25		25		25	1.555.143.750	100	1.555.143.750	100	43,58		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Dokumen	33	7.000.000	-	9	-	6	-	10		8		33		100			
	Administrasi Keuangan							673.026.629		735.326.731		580.323.286	3	588.668.128						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	3.359.676.964	2.812.402.546	3	673.026.629	5	735.326.731	3	580.323.286	3	58.668.128	14	2.577.344.774	100	19,70		

No	Bidang/ Program / Kegiatan	Indikator kerja /Program / Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan 2021								Realisasi		Capaian		Ket
							I		II		III		IV		2021		2021		
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Terbayarnya Insentif Pungutan Retribusi	Bulan	12			3		3		3		3		12		100		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							39.971.705		24.835.000		32.217.773	15	39.982.700		39.971.705		39.971.705	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat penerangan listrik	Bulan	12	8.000.000	5.999.450	3	0	3	934.000	3	2.529.500	3	2.515.000	12	5.978.500	100	99,65	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	Bulan	12	60.000.000	30.000.000	3	7.779.000	3	5.951.000	3	7.082.500	3	6.471.000	12	27.283.500	100	90,95	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	75.000.000	55.000.000	3	16.060.205	3	7.505.000	3	15.755.000	3	15.459.500	12	54.779.705	100	99,60	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Bulan	12	20.000.000	19.999.500	3	3.397.900	3	865.000	3	5.034.700	3	10.671.200	12	19.968.800	100	99,85	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Bulan	12	70.000.000	29.201.000	3	12.734.600	3	9.580.000	3	1.816.073	3	4.866.000	12	28.996.673	100	99,30	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	12				101.004.456		141.462.020		119.597.675		117.410.547		479.474.698			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	5.000.000	3.000.000	3	0	3	0	3	1.060.000	3		12		100	99,11	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet	Bulan	12	98.000.000	98.000.000	3	14.764.687	3	17.422.232	3	16.859.447	3		12		100	68,33	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	40.000.000	20.000.000	3	0	3	19.920.000	3	0	3		12	19.920.000	100	99,60	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor Supporting Staff	Bulan	12	156.480.000	417.429.600	3	86.239.769	3	104.119.788	3	101.678.228	3	97.577.189	12	389.614.974	100	93,34	

No	Bidang/ Program / Kegiatan	Indikator kerja /Program / Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan 2021								Realisasi		Capaian		Ket
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		2021		2021		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	47.000.000		3		3		3		3		12		100		
		Terbayarnya Jasa Pengamanan Gedung/Kantor	Bulan	12	158.340.000		3		3		3		3		12		100		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3	5.777.500	3	27.483.500	3	9.641.410	3	31.510.500	12				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya jasa servis kendaraan & pembayaran pajak kendaraan	Bulan	12	50.000.000	45.000.000	3	3.477.500	3	6.581.500	3	9.441.410	3	23.260.500	12	42.760.910	100	95,02	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Penyusunan DED Gedung Mall Pelayanan Publik	Bulan	12	250.000.000	18.769.600	0	0	0	18.605.000	0	0	0		-	18.605.000	-	99	
		Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	12	150.000.000		3		3		3		3		12		100		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	Bulan	12	10.000.000	13.500.000	3	2.300.000	3	2.297.000	3	200.000	3	8.250.000	12	13.047.000	100	96,64	
		Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	5.000.000		3		3		3		3		12		100		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1 (%)																	100		
Predikat																	Sangat Tinggi		
					20.810.205.464	4.579.385.005		881.195.009		1.066.287.549		929.094.513	41	1.217.320.335		4.093.897.406		89,40	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																	100	89,40	
Predikat																	Sangat Tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																			
Predikat																	Tinggi		

Berdasarkan Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Terselenggaranya Kegiatan Forum Investasi Berbasis Kewilayahan
 - b. Terpublikasinya informasi investasi diluar pameran
 - c. Terselenggaranya matchmaking dan promosi & investasi
 - d. Terlaksananya sosialisasi kebijakan PM kepada masyarakat dan dunia usaha dan Peraturan Perundangan
 - e. Terlaksananya percepatan pelayanan perizinan
 - f. Terlaksananya percepatan pelayanan perizinan dengan baik
 - g. Terlaksananya percepatan pelayanan perizinan satu pintu
 - h. terselesaikannya pengaduan dan gugatan di pengadilan
 - i. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PM
 - j. Terselenggaranya temu usaha dalam rangka Penanaman Modal di luar daerah Kab Temanggung dan dalam daerah berbasis potensi unggulan daerah
 - k. Terlaksananya MONEV dan Pelaporan LKPM
 - l. Terlaksananya MONEV PATEN
 - m. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan
 - n. Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi
 - o. Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - p. Terbayarnya Insentif Pungutan Retribusi
 - q. Tersedianya alat penerangan listrik
 - r. Tersedianya ATK
 - s. Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan
 - t. Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai
 - u. Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah

- v. Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet
 - w. Terbayarnya jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - x. Terbayarnya honor Supporting Staff
 - y. Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
 - z. Terbayarnya Jasa Pengamanan Gedung/Kantor
 - aa. Terbayarnya jasa servis kendaraan & pembayaran pajak kendaraan
 - bb. Terpeliharanya gedung kantor
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada
 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Terlaksananya Pembangunan Mal MPP
 - b. Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan LKPM
 - c. Penyusunan DED Gedung Mall Pelayanan Publik

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Baik yaitu 79,77%, sedangkan realisasi fisik dan keuangan rata-rata penyerapannya adalah 95,97%. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan;

Capaian Kinerja: 79,27 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada

Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA			CAPAIAN 2021 (%)	STATUS			CAPAIAN s.d 2021 (%)	STATUS			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021 Triwulan IV		TT	AT	UK		TT	AT	UK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	16	17	18	19	
A	BIDANG : PENANAMAN MODAL																				
		INDIKATOR SASARAN																			
		Indeks Kemudahan Berusaha					60	62,5	65			78,00	100	TT			100	TT			
		INDIKATOR PROGRAM																			
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi	Milyar		300	360	432	520	625	375,6	1245,7	1.496,68	100	TT			100	TT			
			Nilai Investasi Tahun Berjalan					375,6	1245,7	1.496,68											
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%		10	10	10	10	10	15,63	9,38	0,00	0			UK		0			UK
			Jumlah Potensi Investasi yang sudah dikaji					5	3	0											
			Jumlah seluruh potensi investasi					32	32	32											
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%		100	100	100	100	100	100	0	44	44,19				UK	44,19			UK
			Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan					77	0	19											
Jumlah SDM					77	40	43														

2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%		100	100	100	100	100	60	60,0	60,0	60		UK	60		AT			
			Jumlah informasi yang akan disediakan									3	3	3							
			Jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan									5	5	5							
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan online	%		100	100	100	100	100	46,2	98,48	100,00	100,00	TT		100,00	TT				
			jumlah permohonan on line yang masuk									1272	2333	10124							
			Jumlah permohonan izin yang masuk									2753	2369	10124							
		Persentase perijinan yang bebas calo	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		100	TT			
			Jumlah permohonan izin yang bebas calo									2753	2369	10294							
			Jumlah permohonan perizinan									2753	2369	10294							
		Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	%		95	95	95	95	95	81,21	96,20	100	100	100	TT		100	TT			
			Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu									1232	2279	10294							
			Jumlah pemohon izin yang diterbitkan									1517	2369	10294							
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%		100	100	100	100	100	93,37	93,53	93,53		AT		93,53		AT			
			Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan									110	155	159							
			Jumlah izin yang diterbitkan									110	166	170							
		Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		100	TT			
			Jumlah pengaduan masyarakat									12	12	12							
Terselesaikannya jumlah aduan									12	12	12										

	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT			100	TT			
		Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan						0	0	0										
		Jumlah gugatan hukum						0	0	0										
JML INDIKATOR SASARAN		1	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN									100,00	1	0	0	100,00	1	0	0	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		10	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM									79,77	6	1	3	79,77	6	2	2	
JUMLAH SEMUA INDIKATOR		11	RATA-RATA CAPAIAN PD									89,89	7	1	3	89,89	7	2	2	

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status **telah tercapai** ada 7 terdiri dari:
 - a. Indeks Kemudahan Berusaha
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah permohonan perizinan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi perizinan yang ada.
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya informasi dan pengetahuan tentang perizinan berusaha.
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sosialisasi dan pendampingan.
 - b. Persentase pelayanan perizinan online.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kemampuan petugas pelayanan yang memadai.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih kurangnya informasi dan pengetahuan pemohon izin dalam mengajukan izin secara online.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pelaksanaan pendampingan permohonan izin secara online di wilayah Kecamatan.
 - c. Persentase perizinan bebas calo
 - d. Faktor pendorong indikator tersebut adalah integritas petugas pelayanan yang baik, permohonan izin dapat dilakukan secara online dari rumah tanpa harus datang ke kantor Dinas Penanaman Modal.
 - e. Faktor penghambat indikator tersebut adalah apabila pemohon tidak mau mengurus izin sendiri dengan alasan sibuk dan menyuruh orang lain.
 - f. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah harus ada surat kuasa dari yang bersangkutan.
 - d. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kecepatan dan kecakapan petugas pelayanan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum seluruh kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis ada di Dinas Penanaman Modal.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

diperlukannya penambahan SDM yang mempunyai kompetensi.

e. Nilai Realisasi Investasi

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah permohonan perizinan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi perizinan yang ada.
- 2) Faktor penghambat untuk indikator tersebut adalah kurangnya informasi dan pengetahuan tentang perizinan berusaha.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sosialisasi dan pendampingan.

f. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan

- a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya kesepahaman pengadu dan yang diadukan terhadap masalah yang diadukan.
- b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah apabila yang diadukan dengan pengadu tidak mencapai kata sepakat/tidak ada jalan solusinya.
- c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah aduan yang tidak tercapai kata sepakat diteruskan ke pengadilan.

g. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan

- a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya putusan pengadilan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.
- b. Faktor penghambat : tidak ada hambatan

2. Capaian indikator dengan status **akan tercapai** ada 2 terdiri dari:

- a. Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kepatuhan pemohon terhadap izin yang dikeluarkan/diterbitkan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah ketidakpatuhan pemohon terhadap izin yang dikeluarkan/diterbitkan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pemberian teguran dan pencabutan izin.
- b. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah

masyarakat/investor membutuhkan informasi peluang usaha/bidang unggulan untuk dsapat digunakan sebagai referensi dalam berinvestasi.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya keterbatasan data.
 - 3) Rekomendasi dan tindak lanjut indikator tersebut adalah mengadakan survei lapangan untuk penyusunan informasi dan data
3. Capaian indikator dengan status **upaya keras** ada 2 yaitu:
- a. Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya potensi investasi yang dikaji.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah peleburan bidang pengkajian potensi ke dalam bidang pengembangan penanaman modal yang tidak disertai dengan bergabungnya sdm dari bidang pengkajian potensi ke bidang pengembangan penanaman modal serta refokusing anggaran sehingga fungsi pengkajian potensi tidak dapat dilaksanakan.
 - a. Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pelaksanaan pelatihan dilakukan secara daring.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya informasi/terlambatnya informasi mengenai jadwal pelaksanaan pelatihan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah secara aktif mencari informasi.

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Penanaman Modal terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pengembangan Penanaman Modal dan Data Pokok Bidang Perizinan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Penanaman Modal

a. Indeks Kemudahan Berusaha

Perekonomian daerah dapat menjadi modal pembangunan daerah serta mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perekonomi secara makro ditunjang oleh adanya usaha yang dilakukan oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan investasi dan penyerapan investasi. Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai tujuan ke-3 RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023. Peningkatan tersebut dapat ditingkatkann melalui intervensi pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berusaha. Bahkan melalui UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi konsen pemerintah untuk dapat meningkatkan investasi sebagai penggerak aktivitas ekonomi di level nasional maupun daerah. Fokus kebijakan dalam penyederhanaan prosedur perijinan, digitalisasi proses, dan minimalisir biaya non operational. Menurut Pasal Penjelas huruf C UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja “Kemudahan berusaha” adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka terdapat fokus penjelas kemudahan berusaha adalah ketika proses berusaha dapat berjalan secara sederhana secara prosedur, mudah secara akses dan cepat. Dengan tujuan kebijakan kemudahan berusaha melalui “Melakukan penyesuaian

berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila”.

Pehitungan Indeks kemudahan Berusaha dilaksanakan oleh pihak ke 3 (akademisi), namun dalam perhitungan tersebut indeks kemudahan berusaha menggunakan rentang angka maksimal 5, sedangkan pada Perubahan RPJMD rentang angka yang digunakan maksimal 100, maka untuk menyesuaikan hasil perhitungan yang diperoleh dikalikan 20.

Tabel 2.3
Indeks Kemudahan Berusaha

NO	TAHUN	Indeks Kemudahan Berusaha
1	2017	n.a
2	2018	n.a
3	2019	n.a
4	2020	n.a
5	2021	78

Sumber : DPM 2021

Dari Tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak dapat ditampilkan Indeks Kemudahan Berusaha dikarenakan memang tidak pernah dilakukan pengukuran Indeks Kemudahan Berusaha, Indeks Kemudahan Berusaha merupakan indikator baru, dan baru dapat dilaksanakan pengukuran pada triwulan 4 Tahun 2021 dengan hasil yang diperoleh adalah 78, angka tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 target Indeks Kemudahan Berusaha adalah pada angka 60, hal ini dikarenakan banyaknya regulasi yang mendukung kemudahan berusaha baik dari Pusat maupun Daerah.

b. Nilai Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah nilai modal yang dipergunakan investor dalam menanamkan usahanya di

berbagai bidang usaha terbuka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Ruang Lingkup realisasi investasi meliputi realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Rumus nilai investasi pada tahun berjalan adalah penjumlahan dari realisasi investasi bidang usaha baru di tahun yang bersangkutan.

Tabel 2.4
Realisasi Investasi Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai investasi tahun berjalan	117,67	164,65	760,49	375,6	1.245,66	1.496,68
2	Nilai investasi PMDN					1.245,66	1.486,42
3	Nilai investasi PMA					0	10,26

Sumber : DPM 2021

- Memperhatikan sajian data tabel diatas, dari tahun ke tahun realisasi investasi mengalami kenaikan. Angka kenaikan cukup signifikan tersaji pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 760,49 Milyar yang didorong oleh realisasi investasi pembangunan pabrik sepatu baru di wilayah Kecamatan Kranggan. Sedangkan di periode 2019 ini tercatat nilai realisasi investasi menurun dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 375,6 Milyar.
- Pada tahun 2020 nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.245,66 Milyar, kenaikan nilai realisasi investasi tersebut dikarenakan sejak bulan April 2020 terdapat aplikasi NSWI yang memuat data investasi UMK dan Non UMK secara keseluruhan, serta stimulant bantuan Presiden untuk UMKM membuat pengusaha bergerak aktif mengurus perizinan sehingga membuat laju investasi meningkat tajam sedangkan pada tahun 2019 belum ada aplikasi yang memuat data UMK, juga

masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perizinan.

- Pada tahun 2021 nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.496,68 Milyar.

Data Dukungnya adalah realisasi investasi berdasarkan pencatatan realisasi investasi bidang usaha baru tahun berjalan yang tercatat di sistem OSS Pusat berdasarkan notifikasi perizinan.

Tabel 2.5
REKAPITULASI INVESTASI PMDN/PMA
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	BULAN	INVESTASI PMDN	INVESTASI PMA
1	Januari	155,111,339,389	0
2	Februari	105,785,588,794	0
3	Maret	108,481,518,789	0
4	April	45,032,174,460	0
5	Mei	46,857,731,709	0
6	Juni	83,737,190,015	0
7	Juli	21,865,971,000	0
8	Agustus	31,316,280,005	0
9	September	405,802,305,397	0
10	Oktober	237,656,931,786	0
11	November	149,511,210,044	0
12	Desember	95,263,206,526	10,260,981,788
	Total Investasi	1,486,421,447,915	10,260,981,788

Sumber : DPM 2021

c. Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi

Kajian Teknis adalah kajian untuk menganalisa kelayakan suatu rencana investasi yang meliputi perkiraan biaya investasi, kapasitas produksi dan teknologi.

Potensi Investasi adalah kemampuan investasi yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi aspek teknis, analisa kelayakan atau menghitung kelayakan.

Rumus untuk mendapatkan Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi adalah Jumlah potensi

Investasi yang sudah dikaji dibagi Jumlah seluruh Potensi Investasi dikali 100.

Tabel 2.6
Persentase Kajian Teknis Investasi Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah potensi Investasi yang sudah diKaji	na	na	1	5	3	0
2	Jumlah potensi Investasi	na	na	32	32	32	32
	Persentase	na	na	3,1	15,6 3	9,38	0

Sumber : DPM 2021

Dari data tersebut diatas untuk kegiatan pengkajian teknis investasi sampai dengan tahun 2020 telah terlaksana 9 kajian.

Pada tahun 2021 kegiatan kajian teknis investasi tidak dilaksanakan karena keterbatasan SDM dan adanya refocusing anggaran.

Tabel 2.7
Potensi Investasi di Kabupaten Temanggung

NO	POTENSI INVESTASI	KETERANGAN
1	Albasia	Belum dikaji
2	Mahoni	Belum dikaji
3	Jati	Belum dikaji
4	Tembakau	Belum dikaji
5	Kelapa	Belum dikaji
6	Padi	Belum dikaji
7	Jagung	Belum dikaji
8	Hortikultura	Belum dikaji
9	Kopi	Sudah dikaji
10	Cabe	Belum dikaji
11	Bawang Putih	Sudah dikaji
12	Ketela/ Ubi Rambat / Jalar	Belum dikaji
13	Domba	Belum dikaji
14	Sapi	Belum dikaji
15	Ayam	Belum dikaji
16	Situs Liyangan	Belum dikaji
17	Candi Pringapus	Belum dikaji
19	Kawasan Wisata Terpadu Jumprit	Belum dikaji

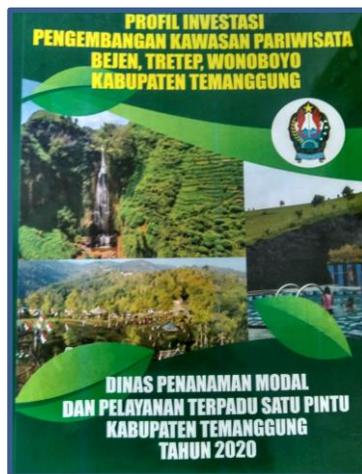
20	Kawasan Terpadu Edu Tourism	Belum dikaji
22	Pikatan Water Park	Belum dikaji
23	Posong	Belum dikaji
24	Kledung Pass	Belum dikaji
25	Bukit Wagir Bawang	Sudah Dikaji
26	Curug Ponco Tunggal	Belum dikaji
27	Curug Surodipo	Sudah dikaji
28	Kawasan Wisata Bejen Tretep Wonoboyo	Sudah dikaji
29	Bukit Kembang Arum	Sudah dikaji
30	UMKM Desa Bansari	Sudah dikaji
31	Rest Area Pringsurat	Sudah dikaji
32	Pengembangan Kawasan Kledung	Sudah dikaji

Sumber : DPM 2021

Data dukung dari indikator ini adalah :

- Analisa Teknis Investasi
- Data-data yang sesuai dengan bidang yang akan dikaji
- Informasi dari masyarakat yang terkait dengan kajian investasi

Data dukung data kajian potensi investasi



Gambar 2.1 Kajian Investasi Kawasan



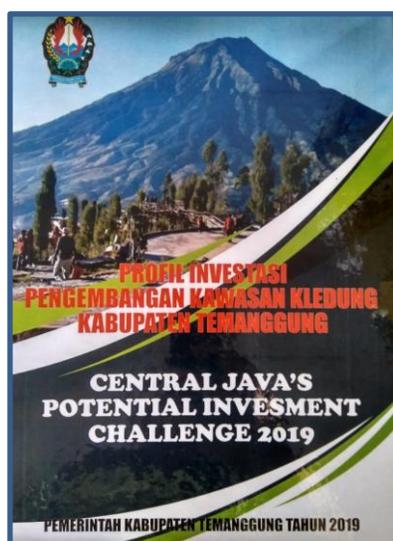
Gambar 2.2 Kajian Investasi Bawang Putih Tahun 2020



Gambar 2.3 Kajian Investasi Pariwisata Bukit Kembang Arum Tahun 2020



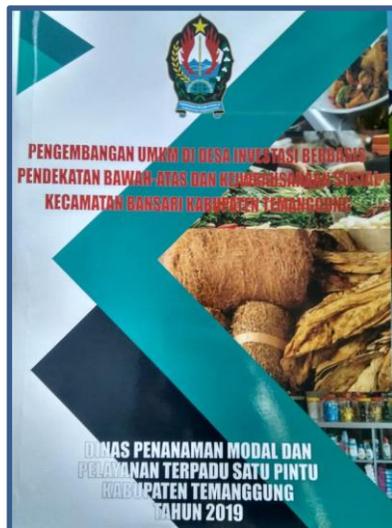
Gambar 2.4 Kajian Investasi Pertanian Kopi Berbasis Corporate Farming Tahun 2019



Gambar 2.5 Kajian Investasi Pengembangan Kawasan Kledung Tahun 2019



Gambar 2.6 Kajian Investasi Pariwisata Curug Surodipo Tahun 2019



Gambar 2.7 Kajian Pengembangan UMKM Desa Bansari Pendekatan Bawah Atas Tahun 2019



Gambar 2.8 Roadmap Investasi Rest Area Pringsurat Tahun 2018



Gambar 2.9 Roadmap Investasi Pengembangan Wisata Wagir Bawang Tahun 2018

d. Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih

Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih adalah ketersediaan SDM yang siap, mau dan mampu melaksanakan tugas dalam usaha pencapaian target investasi dan pelayanan perizinan.

Ruang lingkup dari kegiatan ini meliputi SDM PATEN dan SDM DPMPTSP.

Rumus dari indikator ini adalah Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dibagi Jumlah SDM dikali 100.

Tabel 2.8
Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SDM yang terlatih	na	139	77	77	0	19
2	Jumlah SDM	na	139	77	77	40	43
	Persentase	na	100	100	100	0	44,18

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa SDM yang mengikuti pelatihan bidang PM dan Perizinan dari tahun 2016–2019 sudah 100%. Pada tahun 2020 kegiatan pelatihan bidang PM dan Perizinan belum bisa dilaksanakan dikarenakan adanya wabah “Virus

Corona”, untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan *Social* dan *Phisycal Distancing*, sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2021 kegiatan-kegiatan Pelatihan sudah mulai dilaksanakan walaupun dengan system daring namun dari 43 SDM bidang Penanaman Modan dan Perizinan pada tahun 2021 yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat sebanyak 19 orang hal ini dikarenakan karena kurangnya informasi dan ketersediaan waktu untuk mengikuti pelatihan dari masing masing SDM.

Data dukung dari indikator ini adalah:

Data SDM yang mengikuti pelatihan adalah data SDM DPM yang memiliki sertifikat pelatihan

Tabel 2.9
Daftar SDM yang Memiliki Sertifikat Pelatihan
Tahun 2021

No	Nama	Nomor Sertifikat
1	MANDA KARTIKO S.STP, M.Kom	IX/PUSBINDIKLATREN- MPWK FT UNDIP/PPP/X/2021
2	ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, MM	892.1/10724.157/SO/2021
3	KELIK JOKO M, SH, MM	892.1/10724.163/SO/2021
4	SOLEKHAH, S.AP	2591660/8- 4881/LITDIG/2021
5	TITO SEJATI, SE	892.1/10724.142/SO/2021
6	KABUL SUGIONO, S.AP	892.1/10724.162/SO/2021
7	ALI MASYHADI, A.Md	152/03/GOVREL/VIII/2021
8	YOPIE ARI IWANTORO	2584500/8- 4881/LITDIG/2021
9	KUSUMA ARI SUSANTI, SE, MM	2586269/8- 4881/LITDIG/2021
10	IIS SUSANTI	892.1/0724.139/SO/2021
11	AGNIES AYU K, ST	892.1/0724.144/SO/2021
12	KURNIAWATI WIDIANINGRUM	892.1/0724.140/SO/2021
13	MANGSUR MAHFUD	2584546/8- 4881/LITDIG/2021
14	BUWANA, SE	892.1/0724.141/SO/2021
15	SUBAKIR	2585959/8- 4881/LITDIG/2021

16	BUDI RAHAYU	2585963/8-4881/LITDIG/2021
17	ZAENI	892.1/0724.146/SO/2021
18	TRİYANTI, A.Md	2582908/8-4881/LITDIG/2021
19	HERU SUBAGYO	892.1/0724.161/SO/2021

Sumber : DPM 2021

e. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan

Definisi : tersedianya informasi untuk masyarakat dunia usaha terkait dengan peluang investasi yang ada di Kabupaten Temanggung

Ruang Lingkup : Sektor Pariwisata, sektor UMKM, sektor Pertanian, Perkebunan, sektor peternakan dan sektor perikanan

Rumus Jumlah informasi yang akan disediakan dibagi jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan dikali 100%

Tabel 2.10

Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah informasi yang disediakan	na	na	1	3	3	3
2	Jumlah peluang usaha sektor unggulan	na	na	6	5	5	5
	Persentase	na	na	16,67	60	60	60

Sumber : DPM 2021

Untuk indikator persentase tersedianya informasi peluang usaha/ sektor bidang unggulan di tahun 2020 masih 60 % tersedia yaitu bidang Pariwisata, UMKM dan Pertanian, sedangkan pada tahun 2021 belum ada penambahan informasi peluang usaha di karenakan keterbatasan anggaran.

Data dukung : sc web, foto informasi/leaflet



Gambar 2.10
Leaflet Informasi Peluang Usaha

f. Persentase Pelayanan Perizinan On line

Pelayanan Perizinan On line adalah pelayanan yang didasarkan/berbasis pada tehnologi, informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.

Ruang lingkup indikator ini meliputi data perizinan dan non perizinan dan Perizinan yang sifatnya komersial

Rumus indikator ini adalah jumlah permohonan yang masuk melalui online dibagi dengan semua permohonan izin yang masuk kali 100.

Tabel 2.11
Persentase Pelayanan Perizinan On Line
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Permohonan on line yang terlayani	na	na	361	1.272	6.023	10.124
2	Jumlah pemohon on line yang masuk	na	na	361	2.753	6.575	10.124
	Persentase	na	na	100	46,2	91,60	100

Dari data diatas persentase pelayanan perizinan online pada tahun 2020 sebesar 91,60%. Kecenderungan perizinan online dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 meningkat karena selain perizinan berusaha yang melalui OSS juga ada perizinan selain izin berusaha yaitu melalui aplikasi *sicantik cloud* yang terus diusahakan penyempurnaan aplikasinya dengan tahapan pembuatan format izin yang belum pernah diterbitkan bisa dilayani secara online.

Pada tahun 2021 data perizinan on line Dinas Penanaman modal yang terlayani sudah mencapai 100 %. Hal ini dikarenakan setiap pengajuan perizinan secara online langsung terlayani oleh sistem.

Data dukung untuk indikator ini adalah data pemohon secara on line dan data keseluruhan permohonan izin.

Tabel 2.12
Data Perizinan Online tahun 2021

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSEN TASE IZIN ONLINE (%)
A. IZIN POKOK				
1	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	160	160	100.00
2	IZIN LINGKUNGAN	9	9	100.00
3	IMB	0	0	0.00
4	SLF	0	0	0.00
5	PEMECAHAN IMB	303	303	100.00
B. IZIN BIDANG USAHA				
6	NIB / TDP	8483	8483	100.00
7	SIUP	0	0	0.00
8	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	3	3	100.00
9	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	0	0	0.00
10	IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	0	0	0.00
11	SIUJK	29	29	100.00
12	TD USAHA PARIWISATA	3	3	100.00
13	IZIN ANGKUTAN PERUNTUKAN BARANG UMUM	0	0	0.00

14	IZIN TRAYEK	75	75	100.00
15	IZIN USAHA PETERNAKAN	0	0	0.00
16	IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	0	0.00
17	IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN	0	0	0.00
18	IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0.00
19	IZIN DOKTER HEWAN	0	0	0.00
20	IZIN PENYALUR DAN TOKO ALAT KESEHATAN	0	0	0.00
21	IZIN LABORATORIUM KLINIK	0	0	0.00
22	IZIN PENYELENGGARANAAN OPTIKAL	0	0	0.00
23	IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN	0	0	0.00
24	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	241	241	100.00
25	TDI	0	0	0.00
26	IZIN PEMAKAMAN	0	0	0.00
27	IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA	3	3	100.00
C. IZIN PROFESI				
28	SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis	175	175	100.00
29	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	118	118	100.00
30	SI Kerja Perawat Gigi	0	0	0.00
31	SI Praktik Perawat Gigi	0	0	0.00
32	SI Kerja Bidan	0	0	0.00
33	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	53	53	100.00
34	SI Kerja Apoteker	0	0	0.00
35	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	68	68	100.00
36	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	1	1	100.00
37	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS	0	0	0.00
38	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI	3	3	100.00
39	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	6	6	100.00
40	SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN	73	73	100.00
41	SURAT IZIN KERJA ELEKTROMEDIK	0	0	0.00
42	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI	0	0	0.00
43	SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA	0	0	0.00
44	SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS	0	0	0.00

45	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	4	4	100.00
46	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	14	14	100.00
47	SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANFUSI DARAH	1	1	100.00
48	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	0	0	0.00
49	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	4	4	100.00
50	SURAT IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIKTGM)	2	2	100.00
51	SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	2	2	100.00
52	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)	1	1	100.00
53	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - (SIPPK)	0	0	0.00
54	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR)	19	19	100.00
		0	0	
D. IZIN OPERASIONAL			0	0
55	IZIN KLINIK	3	3	100.00
56	IZIN APOTEK	23	23	100.00
57	IZIN TOKO OBAT	5	5	100.00
58	LAIK SEHAT	7	7	100.00
59	IZIN RADIOLOGI	0	0	0.00
60	LAIK SEHAT KATERING	0	0	0.00
61	LAIK SEHAT RUMAH MAKAN	0	0	0.00
62	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM	0	0	0.00
63	IZIN HEMODIALISA	1	1	100.00
64	IZIN UNIT TRANFUSI DARAH	1	1	100.00
65	SPP-IRT	109	109	0.00
66	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	50	50	100.00
67	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	0	0	0.00
68	SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)	35	35	100.00
69	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	32	32	100.00
70	IZIN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI	4	4	100.00

71	IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN	1	1	100.00
JUMLAH		10124	10124	100.00

Sumber : DPM 2021

g. Persentase perizinan bebas calo :

Perizinan bebas calo adalah pengurusan perizinan yang dilakukan secara mandiri, transparan antara pemohon dan petugas.

Ruang lingkup indikator untuk tercapainya perizinan yang bebas calo adalah SDM perizinan dan juga masyarakat

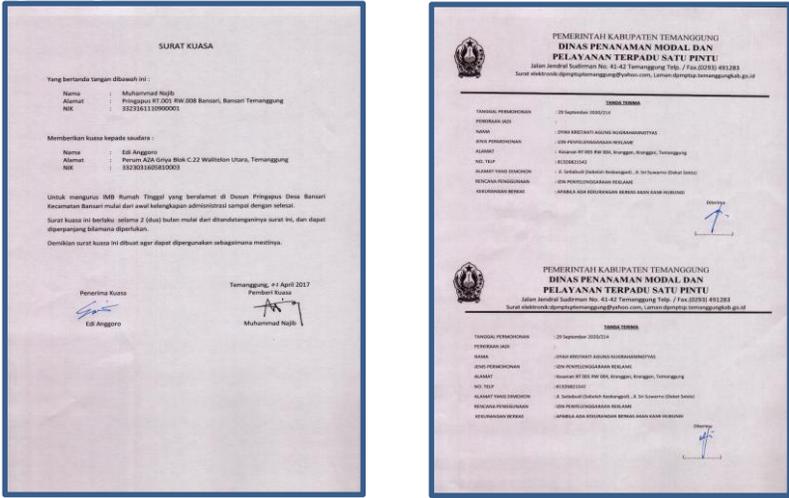
Rumus indikator persentase perizinan bebas calo adalah Jumlah permohonan perizinan yang bebas calo dibagi permohonan perizinan kali 100.

Tabel 2.13
Persentase Permohonan Izin Bebas Calo
Tahun 2016-2021

N O	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah permohonan Izin bebas calo	na	na	1.912	2.753	6.575	10.294
2	Jumlah permohonan izin	na	na	1.912	2.753	6.575	10.294
3	Persentase	na	na	100	100	100	100

Data dukung untuk indikator ini adalah semua izin yang masuk dengan surat pernyataan atau surat kuasa yang diberikan pemohon jika pemilik dari usaha tidak bisa langsung untuk mengajukan permohonan izin.

Data dukung contoh surat kuasa dan permohonan langsung



Gambar 2.11 Surat Kuasa dan Lembar Pendaftaran

Tabel 2.14 Data Perizinan Bebas Calo tahun 2021

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN BEBAS CALO	PROSEN TASE IZIN ONLINE (%)
A. IZIN POKOK				
1	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	160	160	100.00
2	IZIN LINGKUNGAN	9	9	100.00
3	IMB	170	170	100.00
4	SLF	0	0	0.00
5	PEMECAHAN IMB	303	303	100.00
B. IZIN BIDANG USAHA				
6	NIB / TDP	8483	8483	100.00
7	SIUP	0	0	
8	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	3	3	100.00
9	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	0	0	0.00
10	IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	0	0	0.00
11	SIUJK	29	29	100.00
12	TD USAHA PARIWISATA	3	3	100.00
13	IZIN ANGKUTAN PERUNTUKAN BARANG UMUM	0	0	0.00
14	IZIN TRAYEK	75	75	100.00
15	IZIN USAHA PETERNAKAN	0	0	0.00

16	IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	0	0.00
17	IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN	0	0	0.00
18	IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0.00
19	IZIN DOKTER HEWAN	0	0	0.00
20	IZIN PENYALUR DAN TOKO ALAT KESEHATAN	0	0	0.00
21	IZIN LABORATORIUM KLINIK	0	0	0.00
22	IZIN PENYELENGGARANAAN OPTIKAL	0	0	0.00
23	IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN	0	0	0.00
24	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	241	241	100.00
25	TDI	0	0	0.00
26	IZIN PEMAKAMAN	0	0	0.00
27	IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA	3	3	0.00
C. IZIN PROFESI				
28	SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis	175	175	100.00
29	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	118	118	100.00
30	SI Kerja Perawat Gigi	0	0	0.00
31	SI Praktik Perawat Gigi	0	0	0.00
32	SI Kerja Bidan	0	0	0.00
33	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	53	53	100.00
34	SI Kerja Apoteker	0	0	0.00
35	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	68	68	100.00
36	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	1	1	100.00
37	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS	0	0	0.00
38	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI	3	3	100.00
39	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	6	6	100.00
40	SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN	73	73	100.00
41	SURAT IZIN KERJA ELEKTROMEDIK	0	0	0.00
42	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI	0	0	0.00

43	SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA	0	0	0.00
44	SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS	0	0	0.00
45	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	4	4	100.00
46	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	14	14	100.00
47	SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANFUSI DARAH	1	1	100.00
48	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	0	0	0.00
49	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	4	4	100.00
50	SURAT IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIKTGM)	2	2	100.00
51	SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	2	2	100.00
52	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)	1	1	100.00
53	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - (SIPPK)	0	0	0.00
54	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR)	19	19	100.00
D. IZIN OPERASIONAL				
55	IZIN KLINIK	3	3	100.00
56	IZIN APOTEK	23	23	100.00
57	IZIN TOKO OBAT	5	5	100.00
58	LAIK SEHAT	7	7	0.00
59	IZIN RADIOLOGI	0	0	0.00
60	LAIK SEHAT KATERING	0	0	0.00
61	LAIK SEHAT RUMAH MAKAN	0	0	0.00
62	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM	0	0	0.00
63	IZIN HEMODIALISA	1	1	100.00
64	IZIN UNIT TRANFUSI DARAH	1	1	100.00
65	SPP-IRT	109	109	100.00
66	IZIN OPERASIONALRUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	50	50	100.00
67	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	0	0	0.00

68	SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)	35	35	100.00
69	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	32	32	100.00
70	IZIN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI	4	4	100.00
71	IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN	1	1	100.00
JUMLAH		10294	10294	100

Sumber : DPM 2021

h. Persentase Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu

Definisi dari penyelesaian perijinan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan prosedur dan syarat-syaratnya.

Ruang lingkup indikator ini adalah semua pemohon ijin sifatnya komersial dan non komersial.

Rumusnya adalah jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah permohonan izin yang diterbitkan dikali 100.

Tabel 2.15
Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu
Tahun 2016-2021

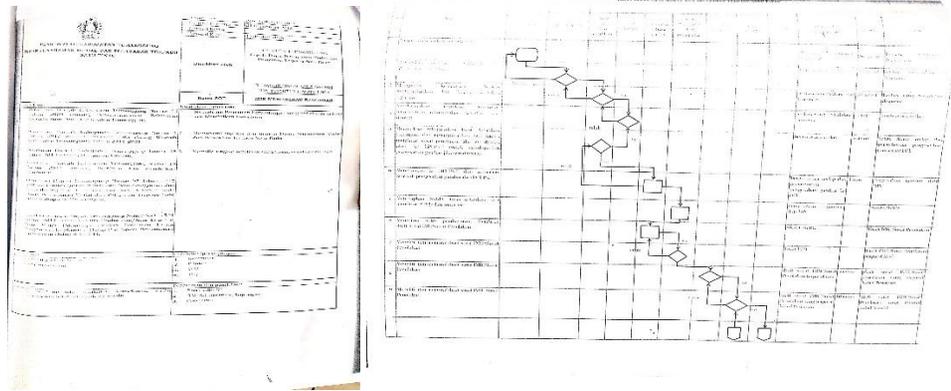
NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Izin tepat waktu	na	910	1.042	1.232	6.091	10.294
2	Jumlah permohonan izin yang diterbitkan	na	1.665	1.912	1.517	6.575	10.294
3	Persentase	na	56,64	54,5	49,28	92,64	100

Sumber : DPM 2021

Dari data tersebut dapat dianalisa yaitu dari tahun 2017-2020 perizinan yang tepat waktu masih belum mencapai 95% ini dikarenakan adanya beberapa kendala teknis di Tim seperti peraturan perundangan teknis Perangkat Daerah lain dan kurangnya Sumber daya Manusia untuk melakukan verifikasi teknis juga dalam penerbitan izin harus melewati dua Kasi.

Pada tahun 2021 izin yang diterbitkan tepat waktu sudah melampaui target yaitu 100% (target 95%). Hal ini dikarenakan ada perubahan SOTK yang baru dimana sudah ada pembagian tugas perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sehingga lebih efektif.

Data dukung indikator ini adalah SOP Perizinan



Gambar 2.12

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Data Jumlah Perizinan Tepat Waktu sesuai dengan jenis izin dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.16
Data Perizinan Tepat Waktu Tahun 2021

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN BEBAS CALO	PROSEN TASE IZIN ONLINE (%)
A. IZIN POKOK				
1	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	160	160	100.00
2	IZIN LINGKUNGAN	9	9	100.00
3	IMB	170	170	100.00
4	SLF	0	0	0.00
5	PEMECAHAN IMB	303	303	100.00
B. IZIN BIDANG USAHA				
6	NIB / TDP	8483	8483	100.00
7	SIUP	0	0	
8	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	3	3	100.00
9	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	0	0	0.00
10	IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	0	0	0.00
11	SIUJK	29	29	100.00
12	TD USAHA PARIWISATA	3	3	100.00

13	IZIN ANGKUTAN PERUNTUKAN BARANG UMUM	0	0	0.00
14	IZIN TRAYEK	75	75	100.00
15	IZIN USAHA PETERNAKAN	0	0	0.00
16	IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	0	0.00
17	IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN	0	0	0.00
18	IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0.00
19	IZIN DOKTER HEWAN	0	0	0.00
20	IZIN PENYALUR DAN TOKO ALAT KESEHATAN	0	0	0.00
21	IZIN LABORATORIUM KLINIK	0	0	0.00
22	IZIN PENYELENGGARANAAN OPTIKAL	0	0	0.00
23	IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN	0	0	0.00
24	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	241	241	100.00
25	TDI	0	0	0.00
26	IZIN PEMAKAMAN	0	0	0.00
27	IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA	3	3	0.00
C. IZIN PROFESI				
28	SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis	175	175	100.00
29	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	118	118	100.00
30	SI Kerja Perawat Gigi	0	0	0.00
31	SI Praktik Perawat Gigi	0	0	0.00
32	SI Kerja Bidan	0	0	0.00
33	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	53	53	100.00
34	SI Kerja Apoteker	0	0	0.00
35	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	68	68	100.00
36	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	1	1	100.00
37	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS	0	0	0.00
38	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI	3	3	100.00
39	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	6	6	100.00
40	SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN	73	73	100.00
41	SURAT IZIN KERJA ELEKTROMEDIK	0	0	0.00
42	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI	0	0	0.00
43	SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA	0	0	0.00
44	SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS	0	0	0.00
45	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	4	4	100.00
46	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	14	14	100.00

47	SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANFUSI DARAH	1	1	100.00
48	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	0	0	0.00
49	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	4	4	100.00
50	SURAT IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIKTGM)	2	2	100.00
51	SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	2	2	100.00
52	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)	1	1	100.00
53	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - (SIPPK)	0	0	0.00
54	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR)	19	19	100.00
D. IZIN OPERASIONAL				
55	IZIN KLINIK	3	3	100.00
56	IZIN APOTEK	23	23	100.00
57	IZIN TOKO OBAT	5	5	100.00
58	LAIK SEHAT	7	7	0.00
59	IZIN RADIOLOGI	0	0	0.00
60	LAIK SEHAT KATERING	0	0	0.00
61	LAIK SEHAT RUMAH MAKAN	0	0	0.00
62	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM	0	0	0.00
63	IZIN HEMODIALISA	1	1	100.00
64	IZIN UNIT TRANFUSI DARAH	1	1	100.00
65	SPP-IRT	109	109	100.00
66	IZIN OPERASIONALRUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	50	50	100.00
67	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	0	0	0.00
68	SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)	35	35	100.00
69	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	32	32	100.00
70	IZIN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI	4	4	100.00
71	IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN	1	1	100.00
JUMLAH		10294	10294	100

i. Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup indikator ini adalah izin yang diterbitkan

Rumus Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan adalah Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan dibagi dengan izin yang diterbitkan kali 100.

Tabel 2.17
Persentase Kesesuaian Perizinan Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kesesuaian Perizinan	na	na	173	110	155	159
2	Jumlah izin yang diterbitkan	na	na	174	110	166	170
	Persentase	na	na	99,43	100	93,37	93,53

Sumber : DPM 2021

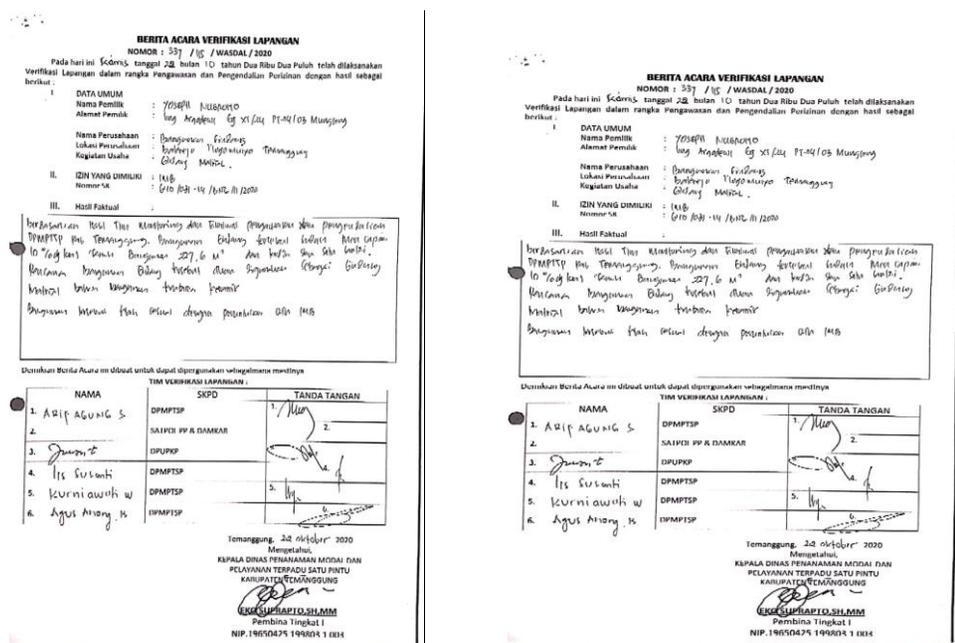
Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan pantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan sejumlah 110 kegiatan Perizinan, atas hasil pengawasan dan pengendalian tersebut bahwa seluruh Perizinan di Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kepatuhan dengan prosentase 100% terhadap kesesuaian

pelaksanaan perizinan di lapangan dengan izin yang telah diterbitkan.

Pada tahun 2020 pelaksanaan perizinan baru mencapai 93,37%, hal ini disebabkan karena ada IMB yang ditetapkan di akhir bulan Desember, sementara kegiatan diakhir tahun sudah tidak ada. Selanjutnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian untuk izin yang telah diterbitkan akan diverifikasi lapangan di tahun berikutnya.

Pada tahun 2021 pelaksanaan perizinan mencapai mengalami kenaikan yaitu 93,53%, Pada tahun 2021 kesesuaian perizinan terutama IMB baru mencapai 93,53%, hal ini dikarenakan dari 170 permohonan terdapat 11 permohonan yang tidak sesuai dengan pengajuan izin serta belum ada kesadaran masyarakat atau kurangnya sosialisasi Perda Nomor 11 tahun 2015.

Data dukung berupa Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian Perizinan, yang selanjutnya disingkat BA, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kesesuaian Penerbitan izin.



Gambar 2.13
Berita Acara Verifikasi Lapangan

j. Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan untuk penanganan pengaduan pelayanan publik dan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberi tugas kepada petugas penanganan yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan.

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya ketidak sesuaian standar proses perizinan atau ketidak sesuaian komitmen Pelaku usaha terhadap izin yang sudah dikeluarkan oleh DPMPTSP. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara lain melalui surat aduan, kotak aduan, melalui website DPMPTSP, dan sms gateway. DPMPTSP telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 034 Tahun 2018.

Ruang lingkup data ini adalah pengelolaan aduan.

Rumus indikator ini adalah Jumlah Pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi dengan jumlah aduan kali 100.

Tabel 2.18
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan
Tahun 2016-2021

No	Uraian	tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pengaduan terselesaikan	na	na	34	12	12	12
2	Jumlah Pengaduan	na	na	34	12	12	12
	Persentase	na	na	100	100	100	100

Sumber : DPM 2021

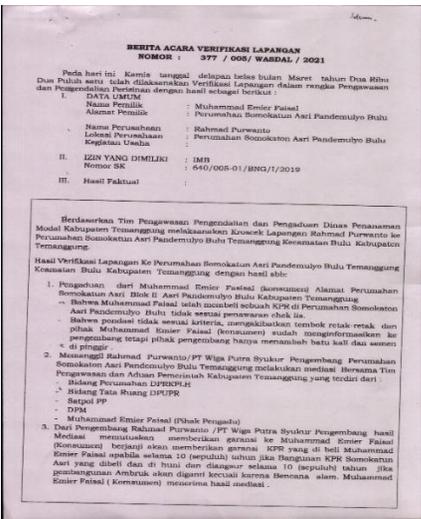
Sesuai dengan data tabel diatas, pada tahun 2017 tidak terdapat satupun pengaduan masyarakat. Dalam analisa DPMPTSP Kabupaten Temanggung, keadaan tersebut terjadi karena minimnya sarana pengaduan pada lembaga pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung pada saat itu, sehingga masyarakat tidak tahu kemana mereka harus melakukan pengaduan terhadap kegiatan penanaman modal yang ada.

Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung melakukan pembenahan dan melengkapi sarana dan prasarana pengaduan dengan membuat Ruang Pengaduan, menetapkan petugas penanganan pengaduan, membuat SOP Pengaduan, menerapkan system pengaduan secara langsung maupun tidak langsung, secara online dan secara offline, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbaikan system pengaduan. Sehingga pada tahun 2018 terdapat data pengaduan yang masuk ke DPMPTSP Kabupaten Temanggung sejumlah 34 pengaduan masyarakat. Menurut Pengaduan masyarakat yang masuk pada Tahun 2018, prosentase terbesar adalah terkait dengan pelanggaran pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sudah mendapatkan izin atau belum mendapatkan izin dari DPMPTSP Kabupaten Temanggung, bukan dari kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan publik pada DPMPTSP kabupaten temanggung. Sejumlah 34 Pengaduan yang masuk ke DPMPTSP semuanya sudah diselesaikan dalam kurun waktu tahun yang sama. DPMPTSP membentuk Tim Penanganan pengaduan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Gabungan OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga penyelesaian Pengaduan masyarakat dapat segera terselesaikan oleh tim penanganan pengaduan. Melihat jumlah pengaduan pada tahun yang masuk pada Tahun 2018 sangat signifikan bila dibandingkan dengan 2017, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi keberhasilan perubahan dan penambahan sarana prasarana, dan sistem

pada lembaga pelayanan publik di Kabupaten Temanggung, sehingga masyarakat bisa dengan mudah dan berani melakukan pengaduan masyarakat.

Pada Tahun 2019 Pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut sudah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan yang tertuang dalam berita acara penanganan pengaduan. Pada tahun 2019 Tim Penanganan Pengaduan juga sudah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung sehingga Pengelolaan pengaduan di Kabupaten Temanggung sudah mempunyai standar dan prosedur yang jelas dalam menangani pengaduan. Prosedur dan standar pengelolaan pengaduan.

Pada tahun 2020 jumlah aduan yang masuk 12 pengaduan dan aduan tersebut dapat diselesaikan. pada tahun 2021 pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut telah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan. Data Dukung yang disajikan berupa Berita Acara penanganan pengaduan pada setiap pengaduan masyarakat yang terselesaikan dan data Rekapitulasi aduan.



Gambar 2.14

Berita Acara Verifikasi Lapangan Penanganan Pengaduan

Data Rekap pengaduan tahun 2021 yang masuk dan tertangani dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.19
Rekap Pengaduan Tahun 2021

No	Tanggal Aduan	Nama	Tanggal Monev	Ket
1	12 Januari 2021	ACHMAD MUTAQIN	12 Januari 2021	Terselesaikan
2	18 Februari 2021	SAIFUDIN ZUHRI	23 Februari 2021	Terselesaikan
3	14 Januari 2021	BURHANUDIN	22 Februari 2021	Terselesaikan
4	2 Februari 2021	CATUR WAHYUNI	2 Februari 2021	Terselesaikan
5	28 Januari 2021	LSM YAKOP	8 Februari 2021	Terselesaikan
6	3 Maret 2021	Muhammad Faizal R	18 Maret 2021	Terselesaikan
7	15 JUNI 2021	JOKO WIKUKUH	16 Juni 2021	Terselesaikan
8	1 September 2021	AGUNG CAHYO KUSUMO	2 September 2021	Terselesaikan
9	7 September 2021	RAHMAT ROMADHANI	10 September 2021	Terselesaikan
10	20 September 2021	MARIA ELISABETH S	23 September 2021	Terselesaikan
11	26 Oktober 2021	EVLIN SAPUTRI	3 November 2021	Terselesaikan
12	8 November 2021	Warga Dusun Sambung Desa Mergowati	15 November 2021	Terselesaikan

Sumber : DPM 2021

k. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan

Definisi Gugatan hukum adalah permasalahan baik pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Biasanya, bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun

berdasarkan atas pelaksanaan salah satu kegiatan penanaman modal di Kabupaten Temanggung

Ruang Lingkup gugatan terhadap perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal.

Rumus Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan di bagi jumlah gugatan dikali 100%.

Tabel 2.20
Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum
di Dalam Pengadilan
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	na	1	1	0	0	0
2	Jumlah gugatan hukum	na	1	1	0	0	0
	Persentase	na	100	100	100	100	100

Sumber : DPM 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdapat 1 gugatan hukum dan dapat diselesaikan di dalam pengadilan. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 belum ada gugatan hukum yang masuk ke DPM.

Data Dukung : 1. Relas Panggilan Dari Pengadilan Negeri Temanggung kepada Tergugat
2. Surat Kuasa Khusus guna mewakili persidangan.
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung.

Data dukung tsb diperlukan apabila ada gugatan hukum.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu

penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DPM dari 11 indikator terdapat 4 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan

Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan pengumpulan data kajian potensi investasi.

- Indikator persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi
Adanya peleburan Bidang Pengkajian Potensi ke Dalam Bidang Pengembangan Penanaman Modal yang tidak disertai dengan Bergabungnya SDM dari bidang Pengkajian Potensi ke Bidang Pengembangan Penanaman Modal serta refocusing anggaran sehingga Fungsi Pengkajian Potensi tidak dapat dilaksanakan.

- Indikator persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih

Hal ini disebabkan karena Pelaksanaan Pelatihan secara daring.

- Indikator persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan

Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPM, antara lain :

- Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan belum mencukupi
- Belum semua kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis ada di DPM

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar

- Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan anggaran
- Pelimpahan regulasi kewenangan dan disertai penyerahan personil pendukung atau SDM nya

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi

perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal (Perangkat Daerah), yaitu sejumlah 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan
 - b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.21 berikut:

Tabel 2.21

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
Administrasi Keuangan							Administrasi Keuangan							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	2.829.053.553		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	2.829.053.553	
			Terbayarnya Insentif Pungutan Retribusi	12	bulan					Terbayarnya Insentif Pungutan Retribusi	12	bulan		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Bea Cukai			280.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat penerangan listrik	12	bulan	5.900.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat penerangan listrik	12	bulan	5.900.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	25.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	25.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	50.000.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	50.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	bulan	15.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	bulan	15.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	12	bulan	30.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	12	bulan	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	12	bulan	3.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	12	bulan	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Rekening Telepon, Listrik dan Air	12	bulan	90.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Rekening Telepon, Listrik dan Air	12	bulan	90.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terbayarnya jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	19.654.800		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terbayarnya jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	19.654.800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya honor SS	12	bulan	413.230.800		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya honor SS	12	bulan	413.230.800	
			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan					Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan		
			Tersedianya jasa Pengamanan Gedung Kantor	12	bulan					Tersedianya jasa Pengamanan Gedung Kantor	12	bulan		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	bulan	45.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	bulan	45.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	10.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	10.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Terselenggaranya Kegiatan Forum Investasi Berbasis Kewilayahan	2	kegiatan	75.000.000		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Terselenggaranya Kegiatan Forum Investasi Berbasis Kewilayahan	2	kegiatan	75.000.000	
			Tersusunnya Raperda Penanaman Modal							Tersusunnya Raperda Penanaman Modal				
								Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						
								Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha	1	Dokumen	75.000.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dan Dunia Usaha Dan Peraturan Perizinan	8	kegiatan	290.000.000		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dan Dunia Usaha Dan Peraturan Perizinan	8	kegiatan	290.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Terselenggaranya matchmaking dan promosi & informasi investasi	2	kegiatan					Terselenggaranya matchmaking dan promosi & informasi investasi	2	kegiatan		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Peningkatan kualitas pelayanan perizinan	12	bulan	389.629.400		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Peningkatan kualitas pelayanan perizinan	12	bulan	389.629.400	
			Tercukupinya Sarana dan Prasarana Perizinan	1	kegiatan					Tercukupinya Sarana dan Prasarana Perizinan	1	kegiatan		
			Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	12	bulan					Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	12	bulan		
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Terselesaikannya pengaduan dan gugatan di pengadilan			20.000.000		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Terselesaikannya pengaduan dan gugatan di pengadilan			20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya pemantauan pelaksanaan penanaman modal	12	bulan			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terselenggaranya temu usaha dalam rangka menjaring Penanam Modal luar daerah di kabupaten	2	bulan	87.500.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya bimtek/sosialisasi kemudahan berusaha	10	kegiatan			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya bimtek/sosialisasi kemudahan berusaha	10	kegiatan	175.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya pengawasan PM	12	bulan					Terlaksananya pengawasan PM	12	bulan	87.500.000	
Jumlah						4.310.468.553	Jumlah						5.015.468.553	

Sumber : DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPd Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPd Kab. Temanggung.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI DINAS PENANAMAN MODAL KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Meningkatnya investasi sektor riil	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	100
			2. Promosi Penanaman Modal	Persentase perizinan yang bebas calo	%	100	100
			3. Pelayanan Penanaman Modal	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	95
			4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100
				Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100
				Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100
				Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	10
			Persentase ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih	%	100	100	
			Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	100	
			Persentase Laju Investasi	%	20	20	
			Nilai Realisasi Investasi	%	520	625	

Sumber : Perubahan renstra Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA DPM TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Belanja Daerah			Belanja Daerah		
	Administrasi Keuangan			Administrasi Keuangan		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.829.053.553		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.829.053.553	
	Insentif Pungutan Retribusi			Insentif Pungutan Retribusi		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	280.000.000	+280.000.000
	Administrasi Umum			Administrasi Umum		
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.900.000		Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.900.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000		Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	
	Penyediaan Jas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jas Surat Menyurat	3.000.000		Penyediaan Jas Surat Menyurat	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralkatan dan Perlengkapan Kantor	19.654.800		Penyediaan Jasa Peralkatan dan Perlengkapan Kantor	19.654.800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	413.230.800		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	413.230.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	10.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	75.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	75.000.000	
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	75.000.000	+75.000.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	389.629.400	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	389.629.400	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	87.500.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	175.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	87.500.000	
JUMLAH	4.310.468.553	JUMLAH	5.015.468.553	

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif pada ahun 2023 sebesar Rp. 255.000.000,- , dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdapat penambahan sub kegiatan di luar rancangan awal Dinas Penanaman Modal, sejumlah 1 (satu) kegiatan yaitu Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Rp. 75.000.000,-
2. Terdapat penambahan sub kegiatan di luar rancangan awal Dinas Penanaman Modal, sejumlah 1 (satu) kegiatan yaitu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 280.000.000,-

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung
Tahun 2023

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN PERENCANAAN 2023

PD : DINAS PENANAMAN MODAL

KODE REKENING	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana				
			Lokasi	TARGET Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2																
2	18															
2	18	01														
2	18	01	2.02				2.829.053.553	2.437.289.790	2.812.402.546	2.690.105.174	95,65	3.111.958.908	DAU			
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Temanggung	14	bulan	2.829.053.553	2.437.289.790	2.812.402.546	2.690.105.174	95,65	3.111.958.908	
					Terpenuhinya Insentif Pungutan Retribusi			12	bulan							
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Bea Cukai										
										275.992.000						
										275.992.000	-	-				

2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						125.900.000	120.000.000	140.199.950	137.007.178	97,72	138.490.000		
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya sarana penerangan listrik	Temanggung	12	bulan		5.900.000	5.000.000	5.999.450	5.978.500	99,65	6.490.000	DAU	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Temanggung	12	bulan		25.000.000	20.000.000	30.000.000	27.283.500	90,95	27.500.000	DAU	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Temanggung	12	bulan		50.000.000	50.000.000	55.000.000	54.779.705	99,60	55.000.000	DAU	
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Temanggung	12	bulan		15.000.000	15.000.000	19.999.500	19.968.800	99,85	16.500.000	DAU	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	Luar Temanggung	12	bulan		30.000.000	30.000.000	29.201.000	28.996.673	99,30	33.000.000	DAU	
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						530.885.600	521.230.800	538.429.600	479.474.698	89,05	583.974.160		
2	18	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	Temanggung	12	Bulan		3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.973.240	99,11	3.300.000	DAU	
2	18	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik dan Air	Temanggung	12	Bulan		90.000.000	90.000.000	98.000.000	66.966.484	68,33	99.000.000	DAU	
2	18	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya jasa service Peralatan dan Perlengkapan	Temanggung	12	Bulan		19.654.800	10.000.000	20.000.000	19.920.000	99,60	21.620.280	DAU	
2	18	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor SS	Temanggung	12	Bulan		413.230.800	418.230.800	417.429.600	389.614.974	93,34	460.053.880	DAU	
						Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Temanggung	12	Bulan									DAU
						Tersedianya Jasa Pengamanan Gedung Kantor	Temanggung	12	Bulan									DAU
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.000.000	55.000.000	77.269.600	74.412.910	96,30	60.500.000		

2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Temanggung	12	Bulan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	42.760.910	95,02	49.500.000	DAU
2	18	01	2.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Temanggung	12	Bulan	-	-	18.769.600	18.605.000	99,12	-	
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Temanggung	12	Bulan	10.000.000	10.000.000	13.500.000	13.047.000	96,64	11.000.000	DAU
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota					75.000.000	75.000.000	83.416.200	79.810.876	95,68	82.500.000	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terselenggaranya Kegiatan Forum Investasi Berbasis Kewilayahan dan Produk Unggulan	Temanggung	2	Kegiatan	75.000.000	75.000.000	83.416.200	79.810.876	95,68	82.500.000	DAU
						Tersusunnya Raperda Penanaman Modal										
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											
2	18	02	2.01	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha	Temanggung	1	Dokumen	75.000.000						
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota					290.000.000	290.000.000	149.999.609	142.846.500	95,23	319.000.000	

2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha dan Peraturan Perizinan	Temanggung	8	Kegiatan	290.000.000	290.000.000	149.999.609	142.846.500	95,23	319.000.000	DAU
						Terselenggaranya Promosi & Informasi Investasi	Temanggung /Luar	2	Kegiatan						-	DAU
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											
2	18	04	2.01	01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					409.629.400	1.799.629.400	330.191.000	303.802.342	92,01	450.592.340	
2	18	4	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Temanggung	12	Bulan	389.629.400	1.789.629.400	314.280.500	287.980.842	91,63	428.592.340	
						Tercukupinya Sarana dan Prasarana Perizinan	Temanggung	1	Kegiatan							DAU
						Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Temanggung	12	Bulan							DAU
2	18	4	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terselesaikannya pengaduan dan gugatan di pengadilan	Temanggung	100	%	20.000.000	10.000.000	15.910.500	15.821.500	99,44	22.000.000	DAU
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											

2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					350.000.000	369.695.000	447.476.500	299.198.128	66,86	406.664.500	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		12	bulan	87.500.000	75.000.000	50.820.000	29.258.500	57,57	82.500.000	DAK
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya BIMTEK/Sosialisasi Kemudahan Berusaha Berbasis Resiko (OSS RBA)	Temanggung	10	Kegiatan	175.000.000	244.695.000	247.258.800	189.745.400	76,74	269.164.500	DAK
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal	Temanggung	12	bulan	87.500.000	50.000.000	149.397.700	80.194.228	53,68	55.000.000	DAK
					JUMLAH					5.015.468.553	5.943.836.990	4.579.385.005	4.206.657.806	91,86	5.153.679.908	

Temanggung, Mei 2022
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN TEMANGGUNG

MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19790412 199711 1 002

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Penanaman Modal untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Penanaman Modal itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Langsung sebesar 85,82%, realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 95,65%, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.015.468.553,- yang terdiri dari 5 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Mei 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002